



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 155 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 59 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 59) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 155**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 155 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 59
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2019-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap SKPD wajib membuat dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 ini mengacu kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perubahan Renstra yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut hingga periode tahun akhir RPJMD.

Latar belakang perubahan yang mempengaruhi substansi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan perubahan Renstra, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut berkewajiban memiliki Rencana Strategis SKPD Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Untuk itu Renstra akan menjadi dasar/pedoman perencanaan tahunan daerah dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yang ditetapkan dengan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi, sesuai dengan Visi, Misi, Arah Pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersinergis, integralistik, holistik, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 terdiri atas:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SK
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan
4.2	Sasaran
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan lingkungan hidup dan tugas pembantuan urusan tata lingkungan, pengendalian dan pelestarian lingkungan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27), maka komposisi jabatan struktural dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Komposisi Jabatan Struktural Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

No.	Jabatan Struktural	Perbup No. 27 Tahun 2016
1.	Eselon II	1
2.	Esselon III	5
3.	Esselon IV	19
Jumlah		25

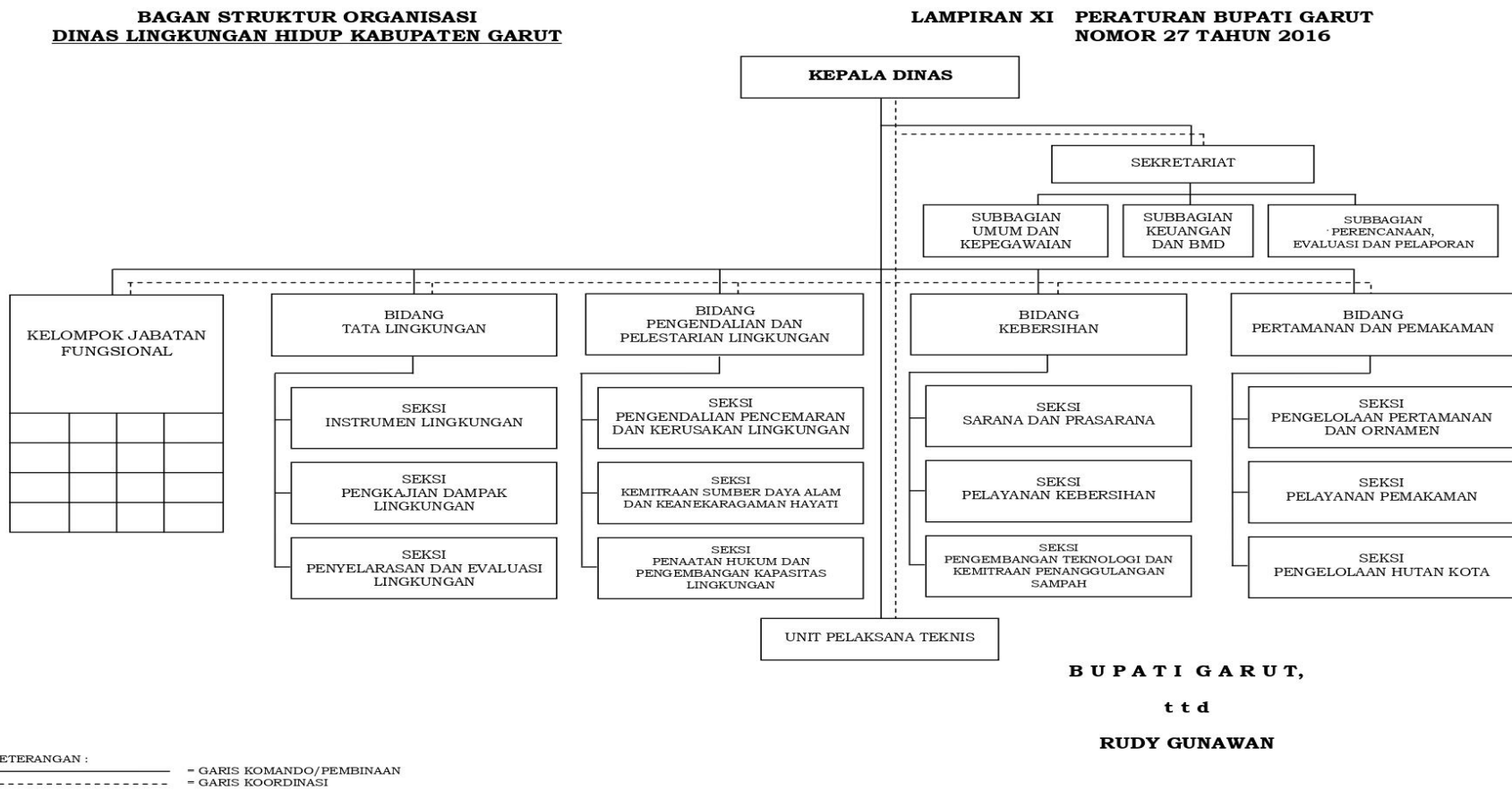
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Garut,2021

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup membawahkan:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;
- c. Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan;
- d. Bidang Kebersihan;
- e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut



2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Sebagian besar sumber daya aparatur pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut berpendidikan SMA. Adapun komposisi pegawai DLH Kabupaten Garut berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Garut berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status		Jumlah
		PNS	NON PNS	
1	S2	9	-	9
2	S1	52	6	58
3	D2	-	-	-
4	D3	2	-	2
5	SMA/ sederajat	146	-	165
6	SMP	38	11	49
7	SD	24	45	69
Jumlah		271	81	352

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Garut, 2021

Selanjutnya, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, DLH Kabupaten Garut didukung pula oleh:

- a. Fasilitas yang tersedia diantaranya jaringan komputer baik internet, faximile dan telepon, yang dapat mempercepat dan mempermudah penyampaian informasi;
- b. Perlengkapan berupa sarana dan prasarana antara lain : gedung/bangunan tempat kerja, kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 2, dan lain sebagainya. Namun mengingat keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang ada dirasakan belum memadai terutama bangunan laboratorium lingkungan yang belum memenuhi standar serta masih kurangnya kendaraan operasional angkutan sampah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Instansi lingkungan hidup di Kabupaten Garut yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten Garut. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang berfungsi untuk pengujian, akan tetapi sampai saat ini pembangunan gedung Laboratorium Lingkungan sampai dengan saat ini belum terbangun.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam dalam pencapaian target antara lain:

- Pendanaan yang terbatas;
- Belum optimalnya penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup;
- Kompetensi SDM aparatur kualifikasi bidang lingkungan hidup masih terbatas;
- Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diarahkan pada upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sampai tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan baru mencapai 56,30 poin yang dapat diartikan berada dalam kondisi kurang baik, meliputi Indeks kualitas air 52,22 poin, indeks kualitas udara 69,47 poin dan indeks kualitas tutupan lahan 49,48 poin. Selain itu, tingkat pelayanan pengelolaan sampah pada tahun 2020 sebesar 25,27%. Berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2015-2020.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

No.	Bidang / Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kualitas Air	Poin	n/a	n/a	49,57	51,33	53,33	52,22
2.	Indeks Kualitas Udara	Poin	n/a	n/a	61,77	69,25	68,72	69,47
3.	Indeks Vegetasi Tutupan Lahan	Poin	n/a	n/a	54,78	49,48	49,48	49,48
4.	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	n/a	n/a	n/a	21	22,60	25,27

Sumber : Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan dan Bidang Kebersihan DLH

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

No.	Bidang / Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	%	n/a	n/a	29 poin	30 poin	Baseline COD yang harus diturunkan 50000 mg/L	5,56
2.	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase parameter yang terakreditasi	%	n/a	n/a	n/a	Dok. Pra akreditasi	Dok. Pra akreditasi	12,5
4.	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	%	n/a	n/a	n/a	1 dok KLHS RTRW	1 dok KLHS RPJMD	20
5.	Persentase dokumen lingkungan yang direkomendasi	%	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7,71

No.	Bidang / Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	0,33	1,055
8.	Persentase lahan kritis yang dikonservasi	%	3,12	4,14	4,7	5,49	7,19	21,32
9.	Persentase desa/ kelurahan/ sekolah yang berbudaya lingkungan	%	n/a	n/a	n/a	30 titik pantau	30 titik pantau	20
10.	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
11.	Persentase Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum	%	0,72	0,72	0,73	0,74	0,78	0,78
12.	Tingkat Pengelolaan Sampah	%	n/a	n/a	n/a	21	22,60	25,27

Sumber : Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan, Tata Lingkungan, Pertamanan dan Pemakaman, Kebersihan DLH

Tabel 2.3**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut**

Uraian ***)	Anggaran pada						Realisasi Anggaran pada					
	Tahun ke-						Tahun ke-					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Urusan Lingkungan Hidup												
Belanja Tidak Langsung	14.300.548.507	15.111.747.164	14.640.646.995	17.960.487.702	18.231.480.988	18.073.320.416,00	14.035.776.617	14.905.842.410	14.505.833.707	17.550.544.668	18.112.603.097	17.569.628.764,00
Belanja Langsung	39.250.815.850	26.919.095.665	25.899.755.087	23.913.329.200	45.342.637.100	34.376.251.200,00	37.174.073.468	26.269.284.188	25.147.220.249	22.945.013.062	44.579.703.902	34.133.825.467,00

Sumber : Bag. Keuangan DLH

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memberikan porsi kewenangan yang lebih besar namun juga diikuti dengan penegasan sanksi yang lebih tinggi termasuk pengenaan sanksi bagi pemberi izin atau pembiaran terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam urusan lingkungan hidup.

Disamping tantangan, keluarnya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru juga memberikan peluang untuk meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup maupun Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam pengawasan dan penindakan pelanggar lingkungan hidup.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis sehingga seiring dengan bertambahnya waktu dalam perkembangannya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Garut sebenarnya sangatlah besar, diharapkan pengelolaannya memenuhi prinsip-prinsip keadilan, berkesinambungan dan berkelanjutan serta konservasi fungsi lingkungan hidup itu sendiri.

Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi.

Dengan memperhatikan permasalahan di atas dan kondisi saat ini, maka tantangan ke depan dibidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah meningkatnya tuntutan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan serta tekanan terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh jumlah penduduk dan kebutuhan akan kualitas hidup masyarakat yang semakin berkembang. Tantangan tersebut mencakup beberapa aspek yaitu kebijakan ekonomi, iklim usaha, politik, pendidikan, kebudayaan dan penguatan masyarakat sipil serta hukum.

Tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut memiliki peran yang strategis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku dituntut untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam serangkaian program dan kegiatan yang mendasar dibidang lingkungan hidup guna diimplementasikan oleh seluruh sub unit organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang maju, sehat,berbudaya, serta berwawasan ilmu dan teknologi;
- 2 Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah yang berfokus pada agribisnis, agroindustri, pariwisata, jasa perdagangan dan kelautan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- 3 Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
- 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut periode tahun 2019 - 2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu tahap yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Pada tahapan ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks provinsi maupun nasional. Selain itu, fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, visi pembangunan Kabupaten Garut yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019 - 2024), yaitu:

“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”

Indikasi terwujudnya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ditandai dengan:

- 1 **Bertaqwa;** Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- 2 **Maju;** Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi
- 3 **Sejahtera;** Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka

kabupaten Garut pada periode 2019- 2024 menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain itu dalam perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 diarahkan untuk merealisasikan 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati periode pada saat kampanye. Program janji kampanye yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah Program ke tujuh, yaitu **“Pelestarian Lingkungan Hidup”**, yang mempunyai target:

1. Reboisasi 2.000 ha lahan gundul dengan melibatkan masyarakat;
2. Menambah hutan kota dan taman kota;
3. Menciptakan lingkungan Garut bersih tanpa sampah.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan sasaran strategis yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang

berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim maka arah kebijakan dan strateginya mencakup :

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi : mengendalikan pencemaran udara, mengendalikan pencemaran, mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut, mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka;
2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi : meningkatkan penanganan sampah, melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30% dari proyeksi timbulan sampah, melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut, meningkatkan pengelolaan B3, melakukan verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3, melakukan pembinaan dan penilaian kinerja limbah B3 dan non B3, meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3;
3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi : fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut, pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, pemulihan kerusakan ekosistem pesisir, pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor dengan strategi : pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sector serta usaha dan/atau kegiatan, peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penyiapan policy brief untuk konsep Forest City;
5. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim , yang dilaksanakan dengan strategi : adaptasi perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang

dengan adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari program. Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,05 poin	57,62 poin	59,18 poin	60,75 poin	62,31 poin

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031, penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata, kelautan dan industry yang berkelanjutan, serta berbasis mitigasi bencana.

Kebijakan penataan ruang meliputi :

- a. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
- b. Pengembangan agribisnis yang berkelanjutan;
- c. Pengembangan pariwisata berbasis potensi local;
- d. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
- f. Pengembangan pusat kegiatan;
- g. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana;
- h. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten :

1. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
2. Pengembangan agribisnis yang berkelanjutan;
3. Pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal;
4. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah;
6. Pengembangan pusat kegiatan;
7. Pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana.

Dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antar wilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di kabupaten Garut, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam penetapan rencana tata ruang wilayah perlu diperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kondisi baseline lingkungan hidup digambarkan pada rangkuman analisis enam aspek muatan kajian, yaitu :

Tabel 3.1.
Kondisi Baseline Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

No.	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
1	Kinerja layanan ekosistem/jasa lingkungan	Jasa ekosistem paling dominan pada ekoregion di kabupaten Garut, yaitu : a. Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik G. Halimun, G. Salak dan G. Sawal; b. Ekoregion Komplek Pegunungan Struktural Ujung Kulon, Cikeupuh, Leuweung Sancang, antara lain pendukung produksi primer, pendukung siklus hara, dan pengaturan mitigasi bencana
2	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDLH)	a. Ketersediaan pangan jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Status daya dukung pangan di Kabupaten Garut menunjukkan masih ada 91,53% dari total luas kabupaten Garut yang belum melampaui daya dukung pangan; b. Wilayah yang sudah melampaui ambang batas penyediaan air sebagian besar berada di wilayah perkotaan di bagian utara, serta sebagian kecil dan tersebar di bagian selatan. Secara keseluruhan, wilayah yang belum melampaui ambang batas penyediaan air di kabupaten Garut seluas 86,6% dari luasan Kabupaten Garut.

No.	Aspek	Penjelasan/Illustrasi
3	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Indikasi tumpang tindih atau konflik pemanfaatan sumber daya alam. Menurut hasil pengolahan data, tidak ada konflik lokasi pemanfaatan SDA di Kabupaten Garut; b. Indikasi tumpang tindih pemanfaatan lahan kawasan RTRW dan tutupan lahan. Tumpang tindih pemanfaatan lahan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan RTRW dengan tutupan lahan di Kabupaten Garut menjadi hal yang harus diperhatikan; c. Potensi tekanan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu fenomena yang dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan; d. Potensi timbulan sampah dan lumpur tinja. Apabila ditinjau, daerah dengan timbulan sampah tertinggi merupakan bangunan permukiman kota. Sebagai akibat dari tekanan penduduk, potensi timbulan sampah akan terus meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Seperti timbulan sampah, lumpur tinja tertinggi juga terdapat pada bangunan permukiman kota e. Potensi beban pencemar. Analisis potensi beban pencemar menunjukan potensi dari sumber yang dapat menghasilkan beban pencemar. Tiga jenis zat pencemar yang dianalisis adalah BOD, COD, TSS.
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Efisiensi penyediaan pangan; Jasa ekosistem paling dominan di Ekoregion Komplek Pegunungan Vulkanik G. Halimun, G. Salak, dan G. Sawal, antara lain penyerbukan alami, pendukung produksi primer, pengaturan kualitas udara, estetika, dan penyedia serat. b. Jasa ekosistem paling dominan di Ekoregion Komplek Perbukitan Struktural Ujung Kulon Cikepuh Leuweung Sancang, antara lain pengaturan kualitas udara, penyediaan serat, penyediaan pangan, pemurnian air, dan penyedia sumber daya genetik.
5	Potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati	Potensi keanekaragaman hayati tinggi pada bagian selatan dan perbatasan kabupaten Garut dengan kabupaten lainnya. Ketahanan potensi keanekaragaman hayati dianalisis dengan shape indeks. Sebagian besar shape indeks di Kabupaten Garut bernilai sangat rendah dan berbentuk cenderung memanjang di sekitar perbatasan Kabupaten Garut. Oleh sebab itu, kerja sama antar daerah diperlukan untuk mengelola lingkungan hidup agar keanekaragaman hayati dapat dipertahankan.
6	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Kabupaten Garut memiliki kerentanan yang sedang dengan potensi bencana berupa gerakan tanah rendah hingga tinggi, gunung api bahaya, tsunami. Hal tersebut perlu diminimalisir dampak yang akan terjadi yaitu dengan memaksimalkan program mitigasi bencana dan adaptasi dampak yang akan terjadi.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Yang dimaksud dengan isu lingkungan dalam konteks ini dibatasi pada isu lingkungan yang sifatnya negatif sehingga perlu tindakan perbaikan. Penetapan isu lingkungan strategis dilakukan sebagai titik awal penetapan strategi, kebijakan, dan program pembangunan pada sektor lingkungan yang menjadi tanggungjawab DLH Kabupaten Garut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Garut Nomor 29 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031, lingkup wilayah RTRW adalah wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih :

- a. Ruang daratan dengan luas 310.705 Ha;
- b. Ruang pesisir laut, sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai;
- c. Ruang udara, dan
- d. Ruang dalam bumi.

Batas koordinat Kabupaten $6^{\circ}56'49''$ – $7^{\circ}45'00''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}25'8''$ – $108^{\circ}7'30''$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.

Jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2020 berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) Badan Pusat Statistik, diproyeksikan mencapai 2.636.637, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.325.506 jiwa dan perempuan sebanyak 1.311.131 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan 14.212 jiwa atau 0,54% dari tahun 2019 sebanyak 2.622.425 jiwa. Dengan luas wilayah 3.107,05 km², tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2020 mencapai rata-rata sebesar 848 jiwa/km², meningkat 4 jiwa/km² dibandingkan tahun 2019 sebesar 844 jiwa/km²

Adapun isu lingkungan hidup yang strategis berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis Perubahan RPJMD 2019-2024, yaitu :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (kualitas Air, kualitas Udara dan kualitas tutupan lahan);
- Pengelolaan sampah.

Berdasarkan KLHS RPJMD 2019 – 2024 pilar lingkungan hidup mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 06, TPB 11 dan TPB 15.

Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD, maka isu strategis lingkungan hidup berdasarkan peringkat prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Isu Prioritas TPB serta Arahan Kebijakan, Program dan Para Pihak yang Mendukung Terwujudnya TPB Prioritas Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

Isu Prioritas	Outcome	Para Pihak	Arahan Kebijakan	Arahan Program
TPB 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Penurunan dampak bencana	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan upaya pengurangan dampak dan pencegahan bencana alam	a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati); c. Program perencanaan lingkungan hidup.
		Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan adaptasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
	Terwujudnya pengelolaan sampah terpadu	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan upaya penegndalian pencemaran, pembinaan, dan pengawasan perlindungan peneglolaan lingkungan hidup dan persampahan terpadu	a. Program pengelolaan persampahan; b. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. Program perencanaan lingkungan hidup; d. Program pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan

				limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
		Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	a. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat; b. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup; c. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
TPB 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Peningkatan cakupan akses terhadap pelayanan fasilitas dasar, meliputi air bersih, sanitasi layak, dan listrik terutama untuk penduduk miskin dan rentan	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan cakupan sanitasi layak dalam pengelolaan sampah maupun limbah rumah tangga	a. Program pengelolaan persampahan.
TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Pemerataan akses terhadap sanitasi layak dan fasilitas kebersihan yang layak dan peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Lingkungan Hidup	Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih sehat bagi masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat	a. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.
		Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga	a. Program pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
TPB 15 : Melindungi,	Terjaminnya pelestarian dan	Dinas Lingkungan	Peningkatan kualitas	a. Program perencanaan

merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	pemanfaatan keberlanjutan ekosistem hutan	Hidup	perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi lingkungan hidup yang sinergi dengan penataan ruang dan pembangunan daerah berkelanjutan, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat	b. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
		Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan hutan dan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	a. Program pengelolaan keanekaragaman hayati.
		Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan upaya penegndalian pencemaran, pembinaan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	a. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Program penanganngan pengaduan lingkungan hidup.
		Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perhutanan sosial	a. Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH; b. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat; c. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan dari misi jangka panjang Kabupaten Garut yang dijabarkan dalam RPJPD 2005 – 2025 yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan adalah “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Daya Fungsi Ruang”. Sedangkan tujuan dari visi Kabupaten Garut yang dijabarkan dalam Perubahan RPJMD 2019 – 2024 yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah “Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan”.

4.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah yaitu “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,05 poin	57,62 poin	59,18 poin	60,75 poin	62,31 poin
			Tingkat Pengelolaan Sampah	25%	25%	35%	45%	55%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam kondisi lingkungan internal terdapat faktor-faktor kekuatan (strengths) dan faktor-faktor kelemahan (weakness) yang dapat diidentifikasi dari lingkungan organisasi sebagai berikut :

Kekuatan (Strengths) :

- Jumlah aparatur cukup memadai;
- Adanya struktur organisasi, kewenangan, tugas dan fungsi DLH Kabupaten Garut;
- Tersedianya data dan informasi lingkungan.

Kelemahan (Weaknesses) :

- Kompetensi aparatur kualifikasi lingkungan masih terbatas;
- Kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja belum memadai;
- Pendanaan yang terbatas;
- Belum optimalnya penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup.

Untuk kondisi lingkungan eksternal dilihat hal-hal yang terkait dengan peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dari lingkungan organisasi.

Peluang (Opportunities) :

- Potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- Dukungan partisipasi masyarakat yang baik akan perlunya lingkungan dikelola secara baik;
- Dicanangkannya Pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- Dukungan secara kelembagaan dari kelembagaan terkait, seperti DLH Provinsi, Pusat, lembaga penelitian dan pengembangan lingkungan, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

Ancaman/tantangan (Threats) :

- Adanya perubahan lingkungan global;
- Perubahan alih fungsi lahan.

Berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal maka disusun asumsi dasar sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Garut Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 55);
2. Jumlah aparatur yang cukup memadai tetapi kompetensi aparatur kualifikasi bidang lingkungan hidup masih terbatas, pegawai kontrak dengan pendidikan dan kemampuan yang baik tidak dapat membantu sepenuhnya mengingat status kepegawaian yang menjadi kendala;
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur yang kurang mendukung dapat menyebabkan penempatan aparatur yang kurang profesional dan dapat berdampak terhadap manajemen yang kurang baik;
4. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja dapat menghambat kinerja dan hasil kerja, hal ini juga merupakan akibat dari terbatasnya pendanaan;
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara optimal dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. Dicanangkannya Pelestarian lingkungan hidup guna meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Adanya perubahan lingkungan global merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama melalui upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Semakin transparannya informasi, sikap masyarakat semakin kritis untuk menuntut pelayanan termasuk tersedianya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Dari faktor internal dan eksternal, setelah dianalisis dengan menggunakan matriks urgensi dan evaluasi faktor internal dan eksternal, maka didapat formula strategi SWOT melalui teknik integrasi yang menghasilkan 4 (empat) formulasi strategis dengan pengertian :

- a. Strategi SO : Merupakan strategi agresif yakni menggunakan kekuatan untuk memeperbesar peluang
- b. Strategi ST : Merupakan strategi diversifikasi yakni memanfaatkan kekuatan untuk menekan atau memperkecil ancaman
- c. Strategi WO : Merupakan strategi “Turn around” yang merupakan langkah menekan kelemahan untuk meraih peluang
- d. Strategi WT : Merupakan strategi yang bersifat defensive, yakni memperkecil kelemahan untuk mengurangi ancaman

Integrasi keempat faktor tersebut dapat menghasilkan formulasi strategis sebagai berikut :

1. Pengendalian pencemaran air dan udara;
2. Peningkatan vegetasi tutupan lahan;
3. Peningkatan pengelolaan sampah.

Kebijakan merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis dan rencana menyeluruh serta terpadu dalam mencapai tujuannya. Untuk menerapkan berbagai kebijakan yang diformulasikan dari hasil analisis SWOT maka dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu menjadi satu acuan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam maupun sumber daya buatan serta sumber daya manusia. Adapun kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3;
2. Peningkatan pemantauan, pengawasan dan penataan hukum terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
3. Optimalisasi Konservasi dan Penataan Ruang Terbuka Hijau;
4. Pengurangan timbulan sampah;

5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
6. Revitalisasi fungsi TPA.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Pengendalian pencemaran air dan udara	1. Optimalisasi fungsi pengelolaan air limbah dan limbah B3; 2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
		2. Peningkatan tutupan vegetasi lahan	1. Optimalisasi program konservasi dan penataan ruang terbuka hijau
		3. Peningkatan pengelolaan sampah	1. Pengurangan timbulan sampah; 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; 3. Revitalisasi fungsi TPA

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 . Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan Revisi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut telah menetapkan beberapa gerakan besar, antara lain:

1. **GERAKAN GARUT LENING**

Melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

2. **GERAKAN HEJO NGEMPLOH WALUNGAN BERSIH**

Melalui konservasi dan kemitraan lingkungan serta pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan.

3. **GERAKAN TALITI GILIR (TATA LINGKUNGAN TI GIRANG KA HILIR)**

Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen lingkungan yang terintegrasi untuk keselamatan bersama.

4. **GERAKAN NATA MAHKOTA**

Melalui pengembangan dan pembangunan tempat pemakaman umum, hutan kota dan taman.

5. **GERAKAN TPA “SARAGA”**

Melalui pembangunan TPA dengan pengelolaan sampah yang sarat edukasi, teknologi, bernilai tambah dan indah.

6. GERAKAN SI LABU UKUR

Melalui pembangunan laboratorium dan akreditasi laboratorium untuk pengukuran kualitas lingkungan.

Guna mendukung ke enam gerakan besar tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 11 Program. Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam mendukung Misi Kabupaten Garut pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019-2024
KABUPATEN GARUT (SEBELUM PERUBAHAN)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2 0 01 5	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																
	Urusan Lingkungan Hidup																
	Program Pengendalian Pencemaran Air	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	Baseline COD yang harus diturunkan adalah 5000 mg/L dari 100 usaha dan/atau kegiatan	10%	11.360.000.000	20%	14.960.000.000	30%	5.110.000.000	40%	7.130.000.000	50%	7.150.000.000	50%	45.710.000.000		Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan
	Penyusunan Beban Pencemar dan Daya Tampung Beban Pencemar	Jumlah Kajian Beban Pencemar dan Daya Tampung Beban Pencemar DAS yang disusun		1 kajian	500.000.000										500.000.000		Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah DAS dan Situ yang dipantau kualitas airnya		3 DAS dan 2 Situ	120.000.000	3 DAS dan 2 Situ	120.000.000	3 DAS dan 2 Situ	150.000.000	3 DAS dan 2 Situ	150.000.000	3 DAS dan 2 Situ	150.000.000	3 DAS dan 2 Situ	690.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pengadaan Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan yang tersedia		1 set	250.000.000									1 set	250.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pembangunan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online	Jumlah Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online		1 DAS	1.250.000.000									1 DAS	1.250.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pemeliharaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online	Jumlah Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online yang terpelihara				1 DAS	30.000.000	1 DAS	30.000.000	1 DAS	30.000.000	1 DAS	30.000.000	1 DAS	120.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pengadaan sistem informasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah sistem pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan		1 Sistem	100.000.000									1 Sistem	100.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pemeliharaan sistem informasi pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah sistem pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan yang terpelihara				1 Sistem	25.000.000	1 Sistem	25.000.000	1 Sistem	25.000.000	1 Sistem	25.000.000	1 Sistem	100.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbina		100 pelaku usaha dan/atau kegiatan	100.000.000	100 pelaku usaha dan/atau kegiatan	100.000.000	100 pelaku usaha dan/atau kegiatan	100.000.000	100 pelaku usaha dan/atau kegiatan	100.000.000	100 pelaku usaha dan/atau kegiatan	100.000.000	500 pelaku usaha dan/atau kegiatan	500.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPERDA)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan peserta PROPERDA		40 pelaku usaha dan/atau kegiatan	140.000.000	50 pelaku usaha dan/atau kegiatan	160.000.000	60 pelaku usaha dan/atau kegiatan	180.000.000	70 pelaku usaha dan/atau kegiatan	200.000.000	80 pelaku usaha dan/atau kegiatan	220.000.000	80 pelaku usaha dan/atau kegiatan	900.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

	Penyusunan FS dan DED IPAL Biodigester dan IPAL Domestik	Jumlah dokumen FS dan DED IPAL Biodigester yang disusun		1 dokumen	100.000.000									100.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Pembuatan IPAL Biodigester	Jumlah IPAL Biodigester yang dibuat		10 Unit Biodigester	300.000.000	10 Unit Biodigester	300.000.000	10 Unit Biodigester	300.000.000	10 Unit Biodigester	300.000.000	10 Unit Biodigester	300.000.000	10 Unit Biodigester	1.500.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pengadaan IPAL Usaha Skala Kecil	Jumlah IPAL Domestik yang dibuat		1 IPAL	300.000.000	1 IPAL	300.000.000	1 IPAL	300.000.000	1 IPAL	300.000.000	1 IPAL	300.000.000	5 IPAL	1.500.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Revitalisasi IPAL Sukaregang	Jumlah IPAL USK yang dibuat		1 IPAL	4.000.000.000									1 IPAL	4.000.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pembangunan Sistem Pengaliran Air Limbah Sukaregang	Jumlah IPAL yang fungsional		3 IPAL	1.500.000.000									3 IPAL	1.500.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Perencanaan Teknis IPAL 4 dan 5 Sukaregang	Jumlah Sistem Pengaliran ke IPAL Komunal		2 sistem IPAL	400.000.000									2 sistem IPAL	400.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan IPAL Sukaregang	Jumlah IPAL yang beroperasi		3 IPAL	1.000.000.000	3 IPAL	3.000.000.000	3 IPAL	3.000.000.000	3 IPAL	5.000.000.000	3 IPAL	5.000.000.000	3 IPAL	17.000.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Penyusunan FS dan DED IPLT	Jumlah dokumen FS dan DED IPLT yang disusun		Jumlah dokumen FS dan DED IPLT yang disusun	350.000.000										350.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pembangunan IPLT	Jumlah IPLT yang dibangun				1 IPLT	5.000.000.000								5.000.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

	Pengadaan Mobil Tinja	Jumlah mobil tinja yang tersedia			-	2 unit	900.000.000							900.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
		Persentase Institusi yang melakukan pengelolaan limbah B3	10%, baru 10 faskes yg diberikan rekomtek tps limbah B3	20%	-	40%		60%		80%		100%	100%	-		
	Penyusunan FS dan DED Pengelolaan Limbah B3 Padat Sukaregang	Jumlah dokumen FS dan DED		1 dokumen	350.000.000									350.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Padat B3 Sukaregang	Jumlah Pusat Pengelolaan Limbah B3 Padat Sukaregang yang terbangun				1 unit	4.000.000.000							4.000.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Pengembangan Sistem Informasi dan Instrumen Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes	Jumlah sistem informasi dan instrumen pembinaan pengelolaan limbah B3 dari Fasyankes		1 Sistem	100.000.000								1 sistem	100.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Pemeliharaan Sistem Informasi dan Instrumen Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes	Jumlah sistem informasi dan instrumen pembinaan pengelolaan limbah B3 dari Fasyankes yang terpelihara				1 sistem	25.000.000	1 sistem	25.000.000	1 sistem	25.000.000	1 sistem	25.000.000	1 sistem	100.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

	Perencanaan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas kesehatan		1 Dokumen Perencanaan Teknis	500.000.000									500.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Pembangunan Sarana Pengelolaan limbah B3 dari Fasilitas Kesehatan	Jumlah Sarana Pengelolaan limbah B3 dari Fasilitas Kesehatan yang dibangun				1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	4 Unit	4.000.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Program Peningkatan Penyelesaian Kasus Lingkungan	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.705.000.000	100%	1.575.000.000	100%	1.805.000.000	100%	1.825.000.000	100%	8.110.000.000	Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan
	Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	350.000.000	5 Dokumen	1.450.000.000	Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
	Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Peraturan Lingkungan Hidup yang disusun				1 dokumen raperda	350.000.000							1 dokumen	350.000.000	Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
	Penaatan Hukum Lingkungan secara Administratif	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Hukum Lingkungan secara Administratif untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ditindaklanjuti melalui mekanisme sanksi administratif		50 pelaku usaha dan/atau kegiatan	200.000.000	60 usaha dan/atau kegiatan	250.000.000	65 pelaku usaha dan/atau kegiatan	300.000.000	70 pelaku usaha dan/atau kegiatan	350.000.000	75 pelaku usaha dan/atau kegiatan	350.000.000	375 pelaku usaha dan/atau kegiatan	1.450.000.000	Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan

	Pengawasan Ketaatan pelaku usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		50 pelaku usaha dan/atau kegiatan	200.000.000	60 usaha dan/atau kegiatan	250.000.000	65 pelaku usaha dan/atau kegiatan	300.000.000	70 pelaku usaha dan/atau kegiatan	350.000.000	75 pelaku usaha dan/atau kegiatan	350.000.000	375 pelaku usaha dan/atau kegiatan	1.450.000.000	Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
	Penaatan Hukum Pidana Lingkungan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Hukum Pidana Lingkungan yang ditindaklanjuti menjadi kasus pidana		1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	450.000.000	1 dokumen	450.000.000	5 dokumen	1.950.000.000	Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
	Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (Satgas Penegakan Hukum Terpadu)	Jumlah Satgas Hukum Lingkungan Terpadu		1 Satgas	100.000.000	1 Satgas	100.000.000	1 Satgas	100.000.000	1 Satgas	100.000.000	1 Satgas	100.000.000	1 Satgas	500.000.000	Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
	Pengembangan Sistem Informasi mengenai tata cara pengaduan kasus lingkungan hidup	Jumlah sistem informasi mengenai tata cara pengaduan kasus lingkungan hidup		1 sistem	100.000.000									1 sistem	100.000.000	Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
	Pemeliharaan sistem informasi mengenai tata cara pengaduan kasus lingkungan hidup	Jumlah sistem informasi mengenai tata cara pengaduan kasus lingkungan hidup yang terpelihara				1 Sistem	25.000.000	1 Sistem	25.000.000	1 Sistem	25.000.000	1 Sistem	25.000.000	1 sistem	100.000.000	Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
	Pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah industri yang dibina		50 pelaku usaha dan/atau kegiatan	100.000.000	50 pelaku usaha dan/atau kegiatan	130.000.000	50 pelaku usaha dan/atau kegiatan	150.000.000	50 pelaku usaha dan/atau kegiatan	180.000.000	50 pelaku usaha dan/atau kegiatan	200.000.000	250 pelaku usaha dan/atau kegiatan	760.000.000	Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan

	Program Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan	Persentase parameter yang terakreditasi	Dokumen pra akreditasi	10,526%	330.000.000	52,632%	350.000.000	68,421%	270.000.000	84,211%	290.000.000	100%	350.000.000	100%	1.590.000.000	
	Standarisasi Akreditasi Laboratorium	Jumlah dokumen persiapan akreditasi		3 dokumen	100.000.000	10 parameter	150.000.000	3 parameter	50.000.000	3 parameter	50.000.000	3 parameter	50.000.000	Terakreditasi 19 parameter	400.000.000	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
	Penyediaan Alat Pendukung Operasional Laboratorium di UPT Laboratorium Lingkungan	Jumlah Unit Alat Pendukung Fasilitas Kantor UPT DLH yang tersedia dan berfungsi dengan baik		3 unit	80.000.000	3 unit	80.000.000	3 unit	80.000.000	3 unit	80.000.000	3 unit	100.000.000	15 unit	420.000.000	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium dan Akomodasi Lingkungan UPT Laboratorium	Jumlah alat laboratorium yang terpelihara		4 unit	50.000.000	7 unit	60.000.000	10 unit	70.000.000	13 unit	80.000.000	16 unit	100.000.000	19 unit	360.000.000	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
	Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek, Pelatihan personil UPT Laboratorium	Jumlah peserta diklat		10 orang	100.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	70.000.000	15 orang	80.000.000	15 orang	100.000.000	15 orang	410.000.000	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
	Program Pencegahan Dampak Lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi		100%	2.300.000.000	100%	2.200.000.000	100%	1.925.000.000	100%	1.975.000.000	100%	2.300.000.000	100%	10.700.000.000	Bidang Tata Lingkungan
	Penyusunan Kajian lingkungan Hidup Strategis	Jumlah KLHS yang disusun	Jumlah KLHS yang disusun untuk KRP RDTR dan RPJMD	1 kajian KLHS KRP RDTR	400.000.000	1 kajian KLHS KRP RDTR	650.000.000	1 kajian KLHS KRP RDTR	700.000.000	1 kajian KLHS KRP RDTR	750.000.000	1 kajian KLHS KRP RPJMD	800.000.000	5 kajian KLHS	3.300.000.000	Seksi Penyelesaian dan Evaluasi Lingkungan
	Penyusunan Peraturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Peraturan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1 dokumen	350.000.000								350.000.000	Seksi Penyelesaian dan Evaluasi Lingkungan
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000	1 dokumen	275.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	1.250.000.000	Seksi Penyelesaian dan Evaluasi Lingkungan

	Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Jumlah kajian yang disusun		1 kajian kawasan / sektor industri	250.000.000	1 kajian kawasan/ sektor pertambangan	250.000.000	1 kajian kawasan/ sektor pariwisata	250.000.000	1 kajian kawasan/ sektor perumahan	250.000.000	2 kajian kawasan/ sektor perdatangan dan pertanian	500.000.000	6 kajian	1.500.000.000	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
	Penyusunan PDRB Hijau	Jumlah dokumen PDRB Hijau yang disusun		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	5 dokumen	500.000.000	Seksi Instrumen Lingkungan
		Persentase dokumen lingkungan yang direkomendasi		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Klinik/Asistensi Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Garut		40 dokumen	100.000.000	40 dokumen	100.000.000	40 dokumen	100.000.000	40 dokumen	100.000.000	40 dokumen	100.000.000	200 dokumen	500.000.000	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Mengenai Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki dengan UKL-UPL atau SPPL	Jumlah Dokumen Produk Hukum terkait jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL		1 produk hukum	250.000.000										250.000.000	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
	Pembuatan/ Pengembangan Aplikasi Berbasis Web dan SMS Gateway sebagai Sistem Informasi Dokumen Lingkungan (SIKOLING)	Jumlah aplikasi		1 aplikasi	250.000.000										250.000.000	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan

	Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun		1 dokumen AMDAL, 1 dokumen UKL/UPL	450.000.000										450.000.000	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
	Sosialisasi Peraturan Perundangan Terkait Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dan Mekanisme Penerbitan Izin Lingkungan	Jumlah peserta		50 peserta	100.000.000	50 peserta	100.000.000	50 peserta	100.000.000	50 peserta	100.000.000	50 peserta	100.000.000	250 peserta	500.000.000	Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
	Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan	Jumlah peserta yang dibina		50 peserta	100.000.000	50 peserta	100.000.000	50 peserta	100.000.000	50 peserta	100.000.000	50 peserta	100.000.000	250 Peserta	500.000.000	Seksi Instrumen Lingkungan
	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah sarana yang tersedia		20 unit	150.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	300.000.000	20 unit	300.000.000	100 unit	1.350.000.000	Seksi Instrumen Lingkungan
	Program Pengendalian Pencemaran Udara	Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX	Baseline IKU = 69,25	7,2022%	1.845.000.000	7,2022%	375.000.000	7,2022%	395.000.000	7,2022%	415.000.000	7,2022%	435.000.000	69,25%	3.465.000.000	Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan
	Penyediaan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Secara Kontinyu, Otomatis dan Online	Jumlah Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Secara Kontinyu, Otomatis dan Online		1 Unit	1.500.000.000									1 Unit	1.500.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

	Pemeliharaan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Secara Kontinyu, Otomatis dan Online	Jumlah Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien Secara Kontinyu, Otomatis dan Online yang terpelihara				1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	120.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah kawasan yang dipantau kualitas udara ambien dan Jumlah industri yang dipantau emisi udaranya	5 kawasan dan 20 usaha dan/atau kegiatan	100.000.000	5 kawasan dan 20 usaha dan/atau kegiatan	100.000.000	5 kawasan dan 20 usaha dan/atau kegiatan	120.000.000	5 kawasan dan 20 usaha dan/atau kegiatan	140.000.000	5 kawasan dan 20 usaha dan/atau kegiatan	160.000.000	5 kawasan dan 20 usaha dan/atau kegiatan	620.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Pembinaan Bengkel Emisi dan Uji Emisi Kendaraan	Jumlah bengkel yang dibina dan jumlah sampel kendaraan yang di uji emisinya	4 bengkel, 100 kendaraan	120.000.000	4 bengkel, 100 kendaraan	120.000.000	4 bengkel, 100 kendaraan	120.000.000	4 bengkel, 100 kendaraan	120.000.000	4 bengkel, 100 kendaraan	120.000.000	4 bengkel, 100 kendaraan	600.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (Pendukung DAK)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan yang disusun	1 Dokumen Evaluasi	125.000.000	1 Dokumen Evaluasi	125.000.000	1 Dokumen Evaluasi	125.000.000	1 Dokumen Evaluasi	125.000.000	1 Dokumen Evaluasi	125.000.000	1 Dokumen Evaluasi	625.000.000	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	0,33%	475.000.000	0,38%	675.000.000	0,43%	675.000.000	0,48%	675.000.000	0,53%	675.000.000	0,53%	3.175.000.000	Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan	
	Inventarisasi dan Mitigasi GRK	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan Mitigasi GRK dari limbah domestik	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	625.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keanekaragaman Hayati	

	Pengembangan Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina		6 lokasi	350.000.000	10 lokasi	550.000.000	10 lokasi	550.000.000	10 lokasi	550.000.000	10 lokasi	550.000.000	42 lokasi	2.550.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keaneekaragaman Hayati
	Program Konservasi Lingkungan dan Kemitraan Lingkungan	Persentase lahan kritis yang dikonservasi	2000 Ha lahan kritis yang akan dikonservasi	20%	9.350.000.000	20%	7.650.000.000	20%	7.650.000.000	20%	7.650.000.000	20%	7.850.000.000	100%	40.150.000.000	Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan
	Penghijauan DAS Cimanuk Hulu	Jumlah luasan lahan yang dikonservasi		250 ha	4.200.000.000	250 ha	4.200.000.000	250 ha	4.200.000.000	250 ha	4.200.000.000	250 ha	4.200.000.000	1250 ha	21.000.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keaneekaragaman Hayati
	Penghijauan Kawasan Perlindungan Mata Air	Jumlah pohon yang ditanam di Kawasan Perlindungan Mata Air		100 ha	1.700.000.000	100 ha	1.700.000.000	100 ha	1.700.000.000	100 ha	1.700.000.000	100 ha	1.700.000.000	500 ha	8.500.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keaneekaragaman Hayati
	Penghijauan di Kawasan Pesisir Pantai	Jumlah pohon yang ditanam di Kawasan Pesisir Pantai		50 ha	900.000.000	50 ha	900.000.000	50 ha	900.000.000	50 ha	900.000.000	50 ha	900.000.000	250 ha	4.500.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keaneekaragaman Hayati
	Pemetaan Lahan Kritis Diluar Kawasan Hutan di Kabupaten Garut	Peta Lahan Kritis di Luar Kawasan		1 dokumen pemetaan	500.000.000									500.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keaneekaragaman Hayati	
	Inventarisasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	Data Base Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup		1 Data Base	500.000.000									1 Data Base	500.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keaneekaragaman Hayati
	Penyusunan Profil Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Profil Kehati		1 Dokumen	500.000.000									1 Dokumen	500.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keaneekaragaman Hayati

		Persentase desa/kelurahan/ sekolah yang berbudaya lingkungan	30 titik pantau Adipura	20%		20%		20%		20%		20%		100%		Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan
	Peningkatan Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Garut (Adipura, Kalpataru, Adiwiyata, Ekoliterasi, dan Zero Waste Culture)	Jumlah komponen kab/kota, sekolah dan komunitas masyarakat yang dibina		30 Titik Pantau Adipura dan 10 Sekolah Binaan Adiwiyata	350.000.000	30 Titik Pantau Adipura dan 10 Sekolah Binaan Adiwiyata	350.000.000	30 Titik Pantau Adipura dan 10 Sekolah Binaan Adiwiyata	350.000.000	30 Titik Pantau Adipura dan 10 Sekolah Binaan Adiwiyata	350.000.000	30 Titik Pantau Adipura dan 10 Sekolah Binaan Adiwiyata	350.000.000	30 Titik Pantau Adipura dan 50 Sekolah Binaan	1.750.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keanekaragaman Hayati
	Pembinaan Desa Berbudaya Lingkungan (Eco Village)	Jumlah desa berbudaya lingkungan yang dibina		10 Desa	150.000.000	10 Desa	150.000.000	10 Desa	150.000.000	10 Desa	150.000.000	10 Desa	150.000.000	50 Desa	750.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keanekaragaman Hayati
	Pengembangan dan peningkatan kapasitas komunitas, kader, relawan lingkungan hidup	Jumlah Komunitas, kader, relawan lingkungan hidup		10 Komunitas, 100 kader, 100 relawan peduli lingkungan hidup	100.000.000	10 Komunitas, 100 kader, 100 relawan peduli lingkungan hidup	100.000.000	10 Komunitas, 100 kader, 100 relawan peduli lingkungan hidup	100.000.000	10 Komunitas, 100 kader, 100 relawan peduli lingkungan hidup	100.000.000	10 Komunitas, 100 kader, 100 relawan peduli lingkungan hidup	100.000.000	10 Komunitas, 100 kader, 100 relawan peduli lingkungan hidup	500.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keanekaragaman Hayati
	Pengembangan Jasa Lingkungan Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Lindung	Jumlah dokumen jasa lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan lindung		1 Dokumen	200.000.000							1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	400.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keanekaragaman Hayati
	Penerapan Mekanisme Jasa Lingkungan	Jumlah kegiatan yang menerapkan jasa lingkungan		1 Lokasi	100.000.000	1 Lokasi	100.000.000	1 Lokasi	100.000.000	1 Lokasi	100.000.000	1 Lokasi	100.000.000		500.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keanekaragaman Hayati
	Kampanye Penyadaran Lingkungan	Jumlah Kampanye Lingkungan Hidup		3 kampanye Lingkungan	150.000.000	3 kampanye Lingkungan	150.000.000	3 kampanye Lingkungan	150.000.000	3 kampanye Lingkungan	150.000.000	3 kampanye Lingkungan	150.000.000		750.000.000	Seksi Kemitraan, SDA dan Keanekaragaman Hayati

	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,115%	0,115%	9.550.000.000	0,125%	11.970.000.000	0,144%	12.847.000.000	0,164%	7.006.700.000	0,164%	2.024.870.000	0,164%	43.398.570.000	Bidang Pertamanan dan Pemakaman
	Pemeliharaan Taman	Jumlah taman perkotaan yang dikelola	3 Ha	3 Ha	550.000.000	3 Ha	550.000.000	3,5 Ha	650.000.000	4,5 Ha	825.000.000	5,5 Ha	1.000.000.000	5,5 Ha	3.575.000.000	Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen
	Pengadaan Kendaraan Mobil Crane	Jumlah Kendaraan Crane yang tersedia		1 unit	800.000.000									1 unit	800.000.000	Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen
	Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis		1 Dokumen	500.000.000									1 Dokumen	500.000.000	Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen
	Penataan Taman	Jumlah taman perkotaan yang ditata		1 Lokasi	400.000.000	1 Lokasi	440.000.000	1 Lokasi	484.000.000	1 Lokasi	532.400.000	1 Lokasi	585.640.000	5 lokasi	2.442.040.000	Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen
	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Citra Landscap Perkotaan di Kota Garut	Jumlah dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang disusun		1 dokumen	500.000.000									1 dokumen	500.000.000	Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen
	Penyusunan Feasibility Study (FS) RTH	Jumlah dokumen Feasibility Study (FS) RTH Perkotaan di Kota Garut yang disusun		1 dokumen	250.000.000									1 dokumen	250.000.000	Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen

	Pengadaan Lahan Taman	Jumlah luas taman yang tersedia				1 Ha	6.000.000.000	1 Ha	6.000.000.000					2,5 Ha	12.000.000.000	Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen
	Pembangunan Taman	Jumlah Taman yang di Bangun			3.000.000.000	0,5 Ha	2.000.000.000	1 Ha	5.000.000.000	1 Ha	5.000.000.000			2,5 Ha	15.000.000.000	Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen
	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah dokumen Peraturan tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang disusun			-	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	100.000.000					2 dokumen	500.000.000	Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen
	Pemeliharaan Hutan Kota	Luas Hutan Kota yang dikelola	2,35 Ha	2,35 Ha	300.000.000	2,35 Ha	330.000.000	3,35 Ha	363.000.000	3,35 Ha	399.300.000	3,35 Ha	439.230.000	3,35 Ha	1.831.530.000	Seksi Pengelolaan Hutan Kota
	Pengadaan Lahan Hutan Kota	Jumlah luas lahan Hutan Kota yang tersedia		1 Ha	3.000.000.000									1 Ha	3.000.000.000	Seksi Pengelolaan Hutan Kota
	Pembangunan Hutan Kota	Jumlah Hutan Kota Yang dibangun			-	1 Ha	2.000.000.000							1 Ha	2.000.000.000	Seksi Pengelolaan Hutan Kota
	Penataan Hutan Kota	Jumlah hutan kota yang ditata		1 lokasi	250.000.000	1 lokasi	250.000.000	1 lokasi	250.000.000	1 lokasi	250.000.000			4 lokasi	1.000.000.000	Seksi Pengelolaan Hutan Kota

	Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum	Persentase Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum	0,74%	0,78%	7.400.000.000	0,79%	3.580.000.000	0,81%	6.863.000.000	0,82%	3.049.300.000	0,84%	7.489.230.000	0,84%	28.381.530.000	Bidang Pertamanan dan Pemakaman
	Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah luas pemakaman umum yang dikelola	6,9 Ha	7,4 ha	300.000.000	10,4 ha	580.000.000	11,4 ha	363.000.000	12,4 ha	399.300.000	13,4 ha	439.230.000	11,4 ha	2.081.530.000	Seksi Pelayanan Pemakaman
	Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum	luas Tempat Pemakaman Umum yang tersedia	6,9 ha	1 Ha	2.600.000.000	1 ha	1.500.000.000	1 ha	5.500.000.000	1 ha	1.650.000.000	1 ha	6.050.000.000	5 ha	17.300.000.000	Seksi Pelayanan Pemakaman
	Penataan Tempat Pemakaman Umum	Jumlah luasan TPU yang ditata		5 Ha	4.500.000.000	3 Ha	1.500.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.000.000.000	6 Ha	9.000.000.000	Seksi Pelayanan Pemakaman
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah	21%	97%	339.219.000.000	98%	71.485.700.000	98%	133.781.800.000	99%	138.810.058.000	99%	136.389.825.000	99%	819.686.383.000	Bidang Kebersihan
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Pengangkut Sampah	Jumlah kendaraan yang terisi BBM		182 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 628 Mosam.	17.467.500.000	182 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 630 Mosam.	17.498.100.000	183 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 631 Mosam.	17.554.200.000	183 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 633 Mosam.	17.584.800.000	184 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 634 Mosam.	17.640.900.000	184 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 634 Mosam.	87.745.500.000	Seksi Pelayanan Kebersihan
	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	Jumlah petugas kebersihan yang tersedia		274 orang petugas kebersihan	3.500.000.000	685 orang petugas kebersihan	8.375.000.000	685 orang petugas kebersihan	8.375.000.000	688 orang petugas kebersihan	8.411.879.000	691 orang petugas kebersihan	8.448.360.000	691 orang petugas kebersihan	37.110.239.000	Seksi Pelayanan Kebersihan

	Penyediaan Service dan Suku cadang Kendaraan Angkutan Sampah	Jumlah Kendaraan yang terpelihara		40 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 31 Mosam.	2.376.500.000	182 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 628 Mosam.	9.832.600.000	182 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 630 Mosam.	9.832.600.000	183 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 633 Mosam.	13.090.879.000	184 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 634 Mosam.	13.623.800.000	184 Armroll /Dumptruck, 1 Fuso, 1 Vacuum Truck, 4 Mini Truck, 1 loader, dan 634 Mosam.	48.756.379.000	Seksi sarana dan prasarana
	Penyediaan Tiffing Fee dan Biaya Operasional Pembuangan Sampah ke TPPAS Legok Nangka	Jumlah sampah yang dibuang ke TPPAS Legok Nangka						100 ton	14.563.500.000	100 ton	16.019.850.000	100 ton	16.019.850.000	100 ton	46.603.200.000	Seksi Pelayanan Kebersihan
	Pengadaan Gerobak Sampah	Jumlah gerobak sampah yang tersedia		30 unit	100.000.000	30 unit	110.000.000	30 unit	121.000.000	30 unit	133.100.000	30 unit	146.410.000	150 unit	610.510.000	Seksi sarana dan prasarana
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Jumlah naskah Perbup yang tersusun		1 naskah	75.000.000	1 naskah	75.000.000							2 naskah	150.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Pengadaan tong sampah	Jumlah tong sampah yang tersedia		50 unit	100.000.000	50 unit	110.000.000	50 unit	121.000.000	50 unit	133.100.000	50 unit	146.410.000	250 unit	610.510.000	Seksi sarana dan prasarana
	Pengembangan pengolahan sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Jumlah lokasi pengembangan pengolahan sampah		4 lokasi	320.000.000	43 lokasi	1.720.000.000	48 lokasi	1.920.000.000	50 lokasi	2.000.000.000	53 lokasi	2.120.000.000	53 lokasi	8.080.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah

	Pengadaan Mesin Pengolah Sampah	Jumlah mesin yang tersedia		5unit	2.500.000.000	7unit	3.500.000.000	8unit	4.000.000.000	10unit	5.000.000.000	12unit	6.000.000.000	12unit	21.000.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Sosialisasi/ Kampanye Pengurangan Sampah di Sumber	Jumlah peserta sosialisasi		100 orang	100.000.000	100 orang	110.000.000	100 orang	121.000.000	100 orang	133.100.000	100 orang	146.410.000	100 orang	610.510.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Pengadaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang tersedia		2 unit loader, 2 unit beco loader	10.000.000.000	1 unit mobil penyapu sampah	4.000.000.000	1 compactor	1.500.000.000	1 compactor	1.500.000.000	1 compactor	1.500.000.000	1 unit loader, 1 unit beco loader, 1 unit mobil penyapu dan 3 unit compactor	18.500.000.000	Seksi sarana dan prasarana
	Pengadaan kendaraan angkutan sampah	Jumlah kendaraan yang tersedia		160 unit dumptruck/armroll truck, 320 kontainer	68.350.000.000	7 unit Fuso	9.100.000.000	1 unit armroll truck, 2 kontainer	540.000.000	1 unit armroll truck, 2 kontainer	540.000.000	1 unit armroll truck, 2 kontainer	540.000.000	1 unit armroll truck, 2 kontainer	79.070.000.000	Seksi sarana dan prasarana
	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah	Jumlah pengumpul sampah yang tersedia		628 unit motor sampah (Roda Tiga)	21.980.000.000	2 unit motor sampah (Roda Tiga)	70.000.000	1 unit motor sampah (Roda Tiga)	35.000.000	2 unit motor sampah (Roda Tiga)	70.000.000	1 unit motor sampah (Roda Tiga)	35.000.000	1 unit motor sampah (Roda Tiga)	22.190.000.000	Seksi sarana dan prasarana

	Pembangunan TPS 3R	Jumlah TPS 3R yang terbangun		76 unit	41.800.000.000	3 unit	1.650.000.000	3 unit	1.650.000.000	3 unit	1.650.000.000	3 unit	1.650.000.000	3 unit	48.400.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Pembangunan Rumah Pengomposan	Jumlah Rumah Kompos yang terbangun		45 unit	15.750.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	17.150.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah (PDU)	Jumlah PDU yang terbangun		36 unit	30.600.000.000	1 unit	850.000.000	2 unit	1.700.000.000	1 unit	850.000.000	1 unit	850.000.000	1 unit	34.850.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Pendirian Bank Sampah dan Penyediaan sarana pendukungnya	Jumlah Bank Sampah yang tersedia		51 unit	12.750.000.000	6 unit	1.500.000.000	5 unit	1.250.000.000	3 unit	750.000.000	4 unit	1.000.000.000	4 unit	17.250.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Pembangunan Transfer Defo	Jumlah Transfer Depo yang terbangun		4 unit	400.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	1.200.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Jumlah SPA yang terbangun		1 Lokasi	2.500.000.000	1 lokasi	2.500.000.000							2 lokasi	5.000.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah

	Penyediaan Lahan Pool Kendaraan	Jumlah lokasi Pool Kendaraan		1 lokasi	400.000.000									1 lokasi	400.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Pembangunan Pool Kendaraan	Jumlah Pool Kendaraan yang terbangun			-	1 unit	500.000.000							1 lokasi	500.000.000	Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah
	Penyediaan Sarana Pewadahan Sampah	Jumlah Tempat Sampah yang tersedia		100 unit	350.000.000	20 unit	70.000.000	20 unit	77.000.000	20 unit	84.700.000	20 unit	93.170.000	180 unit	674.870.000	Seksi sarana dan prasarana
	Revitalisasi TPA Pasir Baging	Jumlah lokasi yang direvitalisasi		1 lokasi	80.000.000.000									1 lokasi	80.000.000.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Penyusunan FS TPA/TPST	Jumlah Dok FS TPA		1 dok	350.000.000									1 dok	350.000.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Pengadaan Lahan TPPAS Banjarwangi	Luas lahan TPPAS			-	5.3 Ha	5.000.000.000							5.3 Ha	5.000.000.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Pembangunan TPPAS Banjarwangi	Jumlah TPPAS yang terbangun			-			1 lokasi	60.000.000.000					1 dok	60.000.000.000	UPT Pengelolaan Sampah

	Pengadaan Lahan TPPAS Pameungpeuk	Luas lahan TPPAS			-			5 Ha	5.000.000.000					1.2 Ha	5.000.000.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Penyusunan DED TPPAS Pameungpeuk	Jumlah Dok DED TPPAS			-					1 dok	60.000.000.000			1 dok	60.000.000.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Pengadaan Lahan TPPAS Caringin	Luas lahan TPPAS			-					0.6 Ha	5.000.000.000			0.6 Ha	5.000.000.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Penyusunan DED TPPAS Caringin	Jumlah Dok DED TPPAS			-							1 dok	60.000.000.000	1 dok	60.000.000.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Penataan TPA	Jumlah lokasi yang ditata		1 lokasi	20.000.000.000	1 lokasi	1.000.000.000	1 lokasi	1.200.000.000	1 lokasi	1.300.000.000	1 lokasi	1.500.000.000	1 lokasi	25.000.000.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah RW yang mengelola sampah di lokasi TPA		7 RW	150.000.000	7 RW	165.000.000	7 RW	181.500.000	7 RW	199.650.000	7 RW	219.615.000	7 RW	915.765.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan TPA Pasir Baging	Jumlah alat berat yang beroperasi		5 alat berat dan 1 dumptruck	1.500.000.000	5 alat berat dan 1 dumptruck	1.100.000.000	5 alat berat dan 1 dumptruck	1.210.000.000	5 alat berat dan 1 dumptruck	1.331.000.000	5 alat berat dan 1 dumptruck	1.464.100.000	4 alat berat	6.605.100.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Pengelolaan Sampah Bersama Masyarakat	Jumlah kecamatan yang mengelola sampah		4 kecamatan	300.000.000	4 kecamatan	300.000.000	4 kecamatan	300.000.000	4 kecamatan	300.000.000	4 kecamatan	300.000.000	4 kecamatan	1.500.000.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Pengadaan Service dan Suku Cadang Alat Berat TPA Pasir Baging	Jumlah alat berat dan kendaraan yang dipelihara		5 alat berat dan 1 dumptruck	500.000.000	5 alat berat dan 1 dumptruck	550.000.000	5 alat berat dan 1 dumptruck	605.000.000	5 alat berat dan 1 dumptruck	665.500.000	5 alat berat dan 1 dumptruck	732.050.000	5 alat berat dan 1 dumptruck	3.052.550.000	UPT Pengelolaan Sampah

	Pengadaan Tanah TPA	Luas lahan TPA yang disediakan		4 ha	5.000.000.000	1 ha	1.250.000.000	1 ha	1.375.000.000	1 ha	1.512.500.000	1 ha	1.663.750.000	8 ha	10.801.250.000	UPT Pengelolaan Sampah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup	100%	100%	1.411.484.800	100%	1.234.352.000	100%	1.257.352.000	100%	1.307.930.000	100%	1.331.243.500	100%	6.542.362.300	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang disediakan		3 jenis jasa	65.000.000	3 jenis jasa	71.500.000	3 jenis jasa	78.650.000	3 jenis jasa	86.515.000	3 jenis jasa	87.000.000	3 jenis jasa	388.665.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		8 unit mobi, 14 unit motor	110.320.000	8 unit mobi, 14 unit motor	121.352.000	8 unit mobi, 14 unit motor	121.352.000	8 unit mobi, 14 unit motor	146.830.000	8 unit mobi, 14 unit motor	147.000.000	8 unit mobi, 14 unit motor	646.854.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga Jasa Kebersihan Kantor, alat kebersihan		4 orang, 33 alat kebersihan	100.000.000	4 orang, 33 alat kebersihan	100.000.000	4 orang, 33 alat kebersihan	110.000.000	4 orang, 33 alat kebersihan	120.000.000	4 orang, 33 alat kebersihan	135.000.000	4 orang, 33 alat kebersihan	565.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		58 jenis ATK	90.000.000	58 jenis ATK	90.000.000	58 jenis ATK	90.000.000	58 jenis ATK	90.000.000	58 jenis ATK	90.000.000	58 jenis ATK	450.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia		14 Jenis Barang Cetak, 170.013 lembar penggandaan	75.000.000	14 Jenis Barang Cetak, 170.013 lembar penggandaan	75.000.000	14 Jenis Barang Cetak, 170.013 lembar penggandaan	75.000.000	14 Jenis Barang Cetak, 170.013 lembar penggandaan	75.000.000	14 Jenis Barang Cetak, 170.013 lembar penggandaan	75.000.000	14 Jenis Barang Cetak, 170.013 lembar penggandaan	375.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang tersedia		9 jenis peralatan kantor	188.164.800	9 jenis peralatan kantor	190.000.000	9 jenis peralatan kantor	192.000.000	9 jenis peralatan kantor	195.000.000	9 jenis peralatan kantor	198.000.000	9 jenis peralatan kantor	963.164.800	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		23 jenis peralatan rumah tangga	35.000.000	23 jenis peralatan rumah tangga	38.500.000	23 jenis peralatan rumah tangga	42.350.000	23 jenis peralatan rumah tangga	46.585.000	23 jenis peralatan rumah tangga	51.243.500	23 jenis peralatan rumah tangga	213.678.500	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		6 jenis koran	10.000.000	6 jenis koran	10.000.000	6 jenis koran	10.000.000	6 jenis koran	10.000.000	6 jenis koran	10.000.000	6 jenis koran	50.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan		2.524 dus/orang untuk 1 tahun	75.000.000	2.524 dus/orang untuk 1 tahun	75.000.000	2.524 dus/orang untuk 1 tahun	75.000.000	2.524 dus/orang untuk 1 tahun	75.000.000	2.524 dus/orang untuk 1 tahun	75.000.000	2.524 dus/orang untuk 1 tahun	375.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Rapat-rapat Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat-rapatkoordinasi luar daerah yang dilaksanakan		12 bulan	170.000.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	170.000.000	12 bulan	850.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

	Rapat-rapat Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan		12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	300.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan		9 jenis komponen listrik	10.000.000	9 jenis komponen listrik	10.000.000	9 jenis komponen listrik	10.000.000	9 jenis komponen listrik	10.000.000	9 jenis komponen listrik	10.000.000	9 jenis komponen listrik	50.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa keamanan kantor		8 orang, 12 bulan	200.000.000	8 orang, 12 bulan	200.000.000	8 orang, 12 bulan	200.000.000	8 orang, 12 bulan	200.000.000	8 orang, 12 bulan	200.000.000	8 orang, 12 bulan	1.000.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Iklan Media Cetak	Jumlah iklan media cetak		22 kali tayang	13.000.000	22 kali tayang	13.000.000	22 kali tayang	13.000.000	22 kali tayang	13.000.000	22 kali tayang	13.000.000	22 kali tayang	65.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan sistem informasi pelayanan publik	Jumlah sistem informasi		1 aplikasi	200.000.000									1 aplikasi	200.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Lingkungan Hidup	100%	100%	4.850.000.000	100%	465.000.000	100%	275.000.000	100%	85.000.000	100%	100.000.000	100%	5.775.000.000	Sekretariat

	Penataan interior dan pengadaan meubelair	Jumlah ruangan yang tertata		2 ruangan	400.000.000	4 ruangan	400.000.000	2 ruangan	200.000.000				4 jenis	1.000.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		2 unit	50.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	85.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	375.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Pembangunan Gedung Kantor (lanjutan)	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun		1 unit gedung laboratorium dan 1 unit kantor TPA	1.500.000.000								-	1 unit gedung kantor	1.500.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Penataan Gedung Kantot	Jumlah gedung kantor yang ditata		Jumlah gedung kantor yang ditata	2.000.000.000											
	Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan yang tersedia		1 unit	900.000.000										900.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase kualitas kinerja aparatur di Dinas Lingkungan Hidup	100%	100%	400.000.000	100%	418.000.000	100%	418.000.000	100%	759.800.000	100%	459.800.000	100%	2.455.600.000	Sekretariat

	Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan		330 orang	110.000.000	330 orang	121.000.000	330 orang	121.000.000	330 orang	133.100.000	330 orang	133.100.000	330 orang	618.200.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		130 orang	120.000.000	130 orang	132.000.000	130 orang	132.000.000	130 orang	145.200.000	130 orang	145.200.000	130 orang	674.400.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olah raga yang diadakan		130 orang	50.000.000	130 orang	55.000.000	130 orang	55.000.000	130 orang	60.500.000	130 orang	60.500.000	130 orang	281.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Pengadaan Pakaian Lapangan	Jumlah pakaian lapangan yang diadakan		200 orang	120.000.000	200 orang	110.000.000	200 orang	110.000.000	200 orang	121.000.000	200 orang	121.000.000	200 orang	582.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Peningkatan sistem absensi berbasis android	Jumlah sistem yang tersedia								1 sistem	300.000.000				300.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	100%	100%	900.000.000	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	525.000.000	100%	550.000.000	100%	2.850.000.000	Sekretariat
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pegawai		600 orang	750.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	250.000.000	150 orang	300.000.000	150 orang	300.000.000	600 orang	1.850.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

	Peringatan Hari-hari Besar	Jumlah pelaksanaan hari hari besar		1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	125.000.000	1 kegiatan	150.000.000	1 kegiatan	175.000.000	1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	750.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen IKM yang tersedia		1 dokumen	50.000.000	85,34	50.000.000	85,34	50.000.000	85,34	50.000.000	85,34	50.000.000	85,34	250.000.000	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	50.000.000	100%	51.000.000	100%	52.000.000	100%	53.000.000	100%	54.000.000	100%	260.000.000	Sekretariat
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang tersedia		5 dokumen	25.000.000	5 dokumen	26.000.000	5 dokumen	27.000.000	5 dokumen	28.000.000	5 dokumen	29.000.000	25 dokumen	135.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Monitoring Evaluasi Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan program dan kegiatan yang tersedia		12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	25.000.000	36 dokumen	125.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100%	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	175.000.000	Sekretariat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia		1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	2 dokumen	35.000.000	6 dokumen	175.000.000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

	JUMLAH			390.675.484.800	117.579.052.000	173.579.152.000	171.571.788.000	169.018.968.500	1.022.424.445.300	
--	--------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	--

Tabel 6.2
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019-2024
KABUPATEN GARUT (SETELAH PERUBAHAN)

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
				TAHUN -1 (2020)		TAHUN -2 (2021)		TAHUN -3 (2022)		TAHUN-4 (2023)		TAHUN-5 (2024)		TARGET	RP			
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
2,11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						86.144.794.761		169.270.967.278		163.952.800.542		245.533.300.542		644.836.063.123		DLH	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup				100%	22.187.749.092	100%	25.885.967.278	100%	22.362.800.542	100%	22.350.300.542	100%	92.786.817.454			

2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan				8 dokumen	100.000.000	7 dokumen	100.000.000	7 dokumen	100.000.000	8 dokumen	100.000.000	30 dokumen	400.000.000		
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	6 dokumen	100.000.000		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja				5 dokumen	25.000.000	5 dokumen	25.000.000	5 dokumen	25.000.000	5 dokumen	25.000.000	20 dokumen	100.000.000		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja				1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen admistrasi keuangan yang tersedia				1 dokumen	19.296.608.892	4 dokumen	19.627.816.842	4 dokumen	19.655.316.842	4 dokumen	19.657.816.842	13 dokumen	78.237.559.418		
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN				1 dokumen (281 ASN)	19.296.608.892	1 dokumen (281 ASN)	19.602.816.842	1 dokumen (281 ASN)	19.602.816.842	1 dokumen (281 ASN)	19.602.816.842	4 dokumen (281 ASN)	78.105.059.418		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan						1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	52.500.000	1 dokumen	55.000.000	3 dokumen	132.500.000		Tarogong Kidul (DLH)

2.11.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan															Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan															Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD yang tersedia				1 dokumen	185.559.886	3 dokumen	195.809.886	3 dokumen	210.000.000	3 dokumen	210.000.000	10 dokumen	801.369.772		
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah penyediaan tenaga jasa keamanan				5 orang	185.559.886	5 orang	185.809.886	5 orang	200.000.000	5 orang	200.000.000	5 orang	771.369.772		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD						1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	3 dokumen	30.000.000		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan BMD															Tarogong Kidul (DLH)

2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia			1 dokumen	214.700.000	2 dokumen	314.700.000	2 dokumen	314.700.000	2 dokumen	314.700.000	7 dokumen	1.158.800.000			
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan			326 stel	214.700.000	326 stel	214.700.000	326 stel	214.700.000	326 stel	214.700.000	326 stel	858.800.000		Tarogong Kidul (DLH)	
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi					1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	3 kegiatan	300.000.000		Kab. Garut	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang tersedia			1 dokumen	388.284.598	1 dokumen	561.165.000	1 dokumen	611.161.800	1 dokumen	631.161.800	4 dokumen	2.191.773.198			
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia			9 komponen	10.000.000	9 komponen	10.000.000	58 jenis ATK dan 9 jenis peralatan kantor	198.161.800	58 jenis ATK dan 9 jenis peralatan kantor	198.161.800		416.323.600		Tarogong Kidul (DLH)	

2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana Perkantoran yang tersedia			58 jenis ATK	79.654.798	58 jenis ATK dan 9 jenis peralatan kantor	193.165.000	25 jenis peralatan rumah tangga	35.000.000	25 jenis peralatan rumah tangga	35.000.000		342.819.798		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			14 Jenis cetakan	50.000.000	14 Jenis cetakan dan penggandaan	60.000.000	14 Jenis cetakan dan penggandaan	70.000.000	14 Jenis cetakan dan penggandaan	80.000.000		260.000.000		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			6 jenis koran	9.888.800	6 jenis koran dan 22 kali Tayang	23.000.000	6 jenis koran dan 22 kali Tayang	23.000.000	6 jenis koran dan 22 kali Tayang	23.000.000		78.888.800		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan			2524 per orang	51.900.000	3.316 per orang	75.000.000	3.316 per orang	75.000.000	3.316 per orang	75.000.000		276.900.000		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan			12 bulan	186.841.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	220.000.000		816.841.000		Kab. Garut dan Luar Kab. Garut
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersedia			1 dokumen	800.000.000	1 dokumen	4.533.086.150	1 dokumen	950.000.000	1 dokumen	950.000.000	4 dokumen	7.233.086.150		

2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia						3 unit mobil	1.138.155.000	2 unit mobil, 4 motor	650.000.000	2 unit mobil, 4 motor	650.000.000	7 unit mobil, 8 motor	2.308.155.000		Tarogong Kidul (DLH)	
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia						2 unit (Crane, mobil truck)	1.309.987.500					2 unit (Crane, mobil truck)	1.459.987.500		Tarogong Kidul (DLH)	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia						5 unit computer/laptop, 2 unit drone, 1 unit infocus, 1 set perlengkapan komputer	150.000.000	5 unit kumputer/laptop 5 printer	100.000.000	5 unit kumputer/laptop, 5 printer	100.000.000	15 unit compute/laptopr, 2 unit drone, 1 unit infocus, 1 set perlengkapan komputer	350.000.000		Tarogong Kidul (DLH)	
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun					800.000.000	1 Unit Gedung Laboratorium	1.755.105.000					1 Unit Gedung Laboratorium	2.555.105.000		Tarogong Kidul (DLH)	
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras yang tersedia						4 ruangan	179.838.650	4 ruangan	200.000.000	4 ruangan	200.000.000	4 ruangan	579.838.650		Tarogong Kidul (DLH)	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia					1 dokumen	148.191.716	1 dokumen	236.621.900	1 dokumen	241.621.900	1 dokumen	246.621.900	4 dokumen	873.057.416		
2.11.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang disediakan					3 jenis	64.998.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	80.000.000	3 jenis	85.000.000	304.998.000		Tarogong Kidul (DLH)	

2.11.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang tersedia				3 orang	83.193.716	4 orang	161.621.900	4 orang	161.621.900	4 orang	161.621.900	4 orang	568.059.416		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan yang tersedia				1 dokumen	1.054.404.000	1 dokumen	316.767.500	1 dokumen	280.000.000	1 dokumen	240.000.000	4 dokumen	1.891.171.500		
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan				8 unit mobil dan 14 unit motor	117.000.000	8 unit mobil dan 14 unit motor	146.430.000	8 unit mobil dan 14 unit motor	130.000.000	8 unit mobil dan 14 unit motor	140.000.000	8 unit mobil dan 14 unit motor	533.430.000		Tarogong Kidul (DLH)
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4 unit	937.404.000	4 unit	170.337.500	4 unit	150.000.000	4 unit	100.000.000	4 unit	1.357.741.500		Tarogong Kidul (DLH)
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi				100%	850.000.000	100%	4.750.000.000	100%	3.550.000.000	100%	3.000.000.000	100%	12.150.000.000		Bidang Tata Lingkungan
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH dan Pendukungnya yang disusun				1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	700.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	250.000.000	7 Dokumen	1.400.000.000		
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang disusun				1 Dokumen DIKPLHD	50.000.000	1 Dokumen DIKPLHD	150.000.000	1 Dokumen DIKPLHD	150.000.000	1 Dokumen DIKPLHD	150.000.000	4 Dokumen DIKPLHD	500.000.000		Kab. Garut

		Jumlah Kajian Akademis RPPLH yang disusun				-	-	1 Kajian Akademis RPPLH	550.000.000	-	-	-	-	1 Kajian Akademis RPPLH	550.000.000		Kab. Garut
		Jumlah RPPLH yang ditetapkan				-	-	-	-	1 Peraturan Daerah	250.000.000	-	-	1 Peraturan Daerah	250.000.000		Kab. Garut
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring Pelaksanaan RPPLH yang disusun				-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Monitoring Pelaksanaan RPPLH	100.000.000	1 Dokumen Monitoring Pelaksanaan RPPLH	100.000.000		Kab. Garut
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun				4 Dokumen KLHS	800.000.000	9 Dokumen KLHS	4.050.000.000	7 Dokumen KLHS	3.150.000.000	6 Dokumen KLHS	2.750.000.000	26 Dokumen KLHS	10.750.000.000		
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah KLHS Tata Ruang yang disusun				3 Dokumen KLHS RDTR	467.500.000	9 Dokumen KLHS RDTR	4.050.000.000	7 Dokumen KLHS RDTR	3.150.000.000	5 Dokumen KLHS RDTR	2.250.000.000	24 Dokumen KLHS RDTR	9.917.500.000		Kab. Garut
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun				1 Dokumen KLHS Revisi RPJMD 2019-2024	332.500.000	-	-	-	-	1 Dokumen KLHS RPJMD 2024-2029	500.000.000	2 Dokumen KLHS RPJMD/Revisi RPJMD	832.500.000		Kab. Garut
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				57,62 poin	3.670.000.000	59,18 poin	28.310.000.000	60,75 poin	16.485.000.000	62,31 poin	15.310.000.000	62,31 poin	54.605.000.000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	

	Lingkungan Hidup																
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				1 dokumen	2.520.000.000	1 dokumen	7.410.000.000	1 dokumen	3.260.000.000	1 dokumen	1.960.000.000	4 dokumen	6.280.000.000		
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan peserta proper						10 pelaku usaha dan/atau kegiatan	200.000.000	15 pelaku usaha dan/atau kegiatan	250.000.000	20 pelaku usaha dan/atau kegiatan	300.000.000	20 pelaku usaha dan/atau kegiatan	750.000.000		Kab. Garut
		Jumlah DAS dan situ yang dipantau kualitas air				3 DAS dan 2 situ (DAS Cimanuk, DAS Cikaengan, DAS Cilaki, Situ bagendit, Situ Cangkuang)	90.000.000	3 DAS dan 2 situ (DAS Cimanuk, DAS Cikaengan, DAS Cilaki, Situ bagendit, Situ Cangkuang)	200.000.000	3 DAS dan 2 situ (DAS Cimanuk, DAS Cikaengan, DAS Cilaki, Situ bagendit, Situ Cangkuang)	225.000.000	3 DAS dan 2 situ (DAS Cimanuk, DAS Cikaengan, DAS Cilaki, Situ bagendit, Situ Cangkuang), Laut (Pantai Santolo)	300.000.000	3 DAS dan 2 situ (DAS Cimanuk, DAS Cikaengan, DAS Cilaki, Situ bagendit, Situ Cangkuang)	815.000.000		
		Jumlah kawasan yang dipantau kualitas udara				4 kawasan	90.000.000	4 kawasan	150.000.000	4 kawasan	175.000.000	4 kawasan	200.000.000	4 kawasan	615.000.000		
		Jumlah alat pemantau kualitas udara						1 set	2.000.000.000	1 set							

		Jumlah Alat Pemantau Kualitas Air (ONLIMO)				1.300.000.000	1 set	1.500.000.000	1 set	1.500.000.000							
		Jumlah Pemeliharaan alat pemantau kualitas air yang beroperasi				1 set		1 set	60.000.000	1 set	60.000.000		60.000.000				
		Jumlah kajian kualitas tanah				1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 kajian							
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen kajian GRK				1 Dokumen Kajian	100.000.000	1 Dokumen Kajian	100.000.000	1 Dokumen Kajian	100.000.000	1 Dokumen Kajian	100.000.000	4 Dokumen Kajian	400.000.000		Kab. Garut
		Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina				5 Lokasi Binaan Kampung Iklim	500.000.000	5 Lokasi Binaan Kampung Iklim	500.000.000	5 Lokasi Binaan Kampung Iklim	500.000.000	5 Lokasi Binaan Kampung Iklim	500.000.000	20 Lokasi Binaan Kampung Iklim	2.000.000.000		
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah parameter pengujian yang terakreditasi				8 parameter	350.000.000	2 parameter	400.000.000	4 parameter	450.000.000	3 parameter	500.000.000	19 parameter	1.700.000.000		Kab. Garut
		Jumlah alat laboratorium							2.000.000.000	1 set							
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersedia						3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	375.000.000	3 dokumen	450.000.000	9 dokumen	1.125.000.000		

2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun						1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	150.000.000		375.000.000		Kab. Garut
2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen laporan data pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	150.000.000		375.000.000		Kab. Garut
2.11.03.2.01.04	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen laporan data penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	150.000.000		375.000.000		Kab. Garut
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang tersedia				1 dokumen	1.150.000.000	3 dokumen	20.600.000.000	3 dokumen	12.850.000.000	3 dokumen	12.900.000.000	10 dokumen	47.200.000.000		
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Jumlah Dokumen Penyusunan daya tampung beban pencemar yang tersusun						1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	400.000.000		1.050.000.000		Kab. Garut

2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar						2 kegiatan (operasional/revitalisasi/pembangunan IPAL, biogas)	10.000.000.000	2 kegiatan (operasional/pembangunan IPAL, biogas)	2.500.000.000	2 kegiatan (operasional IPAL, biogas)	2.500.000.000	15.000.000.000		Kab. Garut
2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen kajian kawasan lahan kritis						1 dokumen	300.000.000							Kab. Garut
		Luas lahan yang direhabilitasi				35 ha	1.150.000.000	400 ha	10.000.000.000	400 ha	10.000.000.000	400 ha	10.000.000.000	31.150.000.000		
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)				0,125	1.450.000.000	0,146	12.800.000.000	0,156	18.530.000.000	0,166	20.383.000.000	0,166	42.663.000.000	Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau				38 lokasi	1.450.000.000	38 lokasi	12.800.000.000	40 lokasi	18.530.000.000	42 lokasi	20.383.000.000	42 lokasi	42.663.000.000	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						1 dokumen perencanaan	500.000.000					500.000.000		Perkotaan Garut

2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Luar Kawasan Hutan	Jumlah lokasi untuk melengkapi Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan					1 lokasi	7.000.000.000	1 lokasi	7.700.000.000	1 lokasi	8.470.000.000		23.170.000.000		Perkotaan Garut	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					1.450.000.000	7,39 Ha	5.000.000.000	7,89 Ha	5.500.000.000	8,39 Ha	6.050.000.000		18.000.000.000		Perkotaan Garut
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah lokasi untuk melengkapi Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya					1 lokasi	200.000.000	1 lokasi	220.000.000	1 lokasi	242.000.000		662.000.000		Perkotaan Garut	
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kecamatan yang telah menerapkan jasa lingkungan					1 kecamatan	100.000.000	1 kecamatan	110.000.000	1 kecamatan	121.000.000		331.000.000		Perkotaan Garut	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah lokasi untuk melengkapi sarana dan prasarana Taman Kehati							1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.500.000.000		10.500.000.000		Perkotaan Garut	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3					100%	1.550.000.000	100%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	3.100.000.000		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan data Penyimpanan Sementara limbah B3 pelaku usaha dan/atau kegiatan					1 laporan	1.100.000.000	1 laporan	550.000.000	1 laporan	600.000.000	1 laporan	2.250.000.000			

2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha/kegiatan yang mendapatkan pembinaan pengelolaan limbah B3						1 aplikasi	100.000.000					100.000.000		Kab. Garut	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang di verifikasi						20 pelaku usaha dan/atau kegiatan	100.000.000	30 pelaku usaha dan/atau kegiatan	150.000.000	40 pelaku usaha dan/atau kegiatan	200.000.000	40 pelaku usaha dan/atau kegiatan	450.000.000		Kab. Garut
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengumpulan Limbah B3						2 laporan	450.000.000	2 laporan	200.000.000	2 laporan	200.000.000	6 laporan	850.000.000		
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen FS tempat pengumpulan Limbah B3 skala Kawasan						1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	550.000.000		Kab. Garut

2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen pengelolaan limbah B3					1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	300.000.000		Kab. Garut	
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan				4 Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	400.000.000	3 Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	625.000.000	3 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	725.000.000	3 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	825.000.000	13 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	2.575.000.000	Bidang Tata Lingkungan	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan				4 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	400.000.000	3 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	625.000.000	3 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	725.000.000	3 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	825.000.000	13 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	2.575.000.000		
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan dan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direkomendasikan				3 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen Fasilitasi	300.000.000	1 Dokumen Fasilitasi	400.000.000	1 Dokumen Fasilitasi	500.000.000	1 Dokumen Fasilitasi	1.500.000.000		Kab. Garut

2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah peserta diklat				-		4 Peserta	50.000.000	4 Peserta	50.000.000	4 Peserta	50.000.000	4 Peserta	150.000.000		Kab. Garut
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan usaha dan/atau kegiatan				1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen Pengawasan	200.000.000	1 Dokumen Pengawasan	200.000.000	1 Dokumen Pengawasan	200.000.000	1 Dokumen Pengawasan	700.000.000		Kab. Garut
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah dokumen Koordinasi dan pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH				-		1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	75.000.000,00	3 Dokumen	225.000.000		Kab. Garut
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan Adat dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						1 lokasi	400.000.000	1 lokasi	440.000.000	1 lokasi	484.000.000	928.200.000		Bidang Konservasi Lingkungan dan Keaneekaragaman Hayati	

2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah lokasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang diakui					1 lokasi	200.000.000	1 lokasi	220.000.000	1 lokasi	242.000.000	662.000.000		
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Status Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal terkait PPLH					1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	242.000.000	662.000.000		Kab. Garut
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah lokasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang terbina					1 lokasi	200.000.000	1 lokasi	220.000.000	1 lokasi	242.000.000	266.200.000		
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan	Jumlah lokasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang diberdayakan					1 lokasi	200.000.000		220.000.000		242.000.000	662.000.000		Kab. Garut

	Hak MHA terkait dengan PPLH															
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan					25%	600.000.000	25%	660.000.000	50%	726.000.000	100%	1.986.000.000	Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan					5 kecamatan	600.000.000	5 kecamatan	660.000.000	5 kecamatan	726.000.000	15 kecamatan	1.986.000.000		
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa/kelurahan yang dibina					5 Desa/Kelurahan	200.000.000	5 Desa/Kelurahan	220.000.000	5 Desa/Kelurahan	242.000.000	5 Desa/Kelurahan	662.000.000		Kab. Garut

2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah desa/kelurahan yang berbudaya lingkungan					5 Desa/Kelurahan	200.000.000	5 Desa/Kelurahan	220.000.000	5 Desa/Kelurahan	242.000.000	5 Desa/Kelurahan	662.000.000		Kab. Garut	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Kampanye Peringatan Lingkungan di Kabupaten Garut					1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	220.000.000	1 kegiatan	242.000.000	1 kegiatan	662.000.000		Kab. Garut	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan			20		20	500.000.000	30	550.000.000	30	605.000.000	100	1.855.000.000	Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten				1 kegiatan	200.000.000	1 kegiatan	500.000.000	1 kegiatan	550.000.000	1 kegiatan	605.000.000	1.855.000.000			
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi titik pantau yang dibina (Adipura, Adiwiyata)			5 lokasi		200.000.000	10 lokasi	500.000.000	10 lokasi	550.000.000	10 lokasi	605.000.000	1.855.000.000		Kab. Garut	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup			100%		80.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	980.000.000	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	

2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				1 laporan	80.000.000	2 laporan	300.000.000	2 laporan	300.000.000	2 laporan	300.000.000	7 laporan	980.000.000		Kab. Garut
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				1 laporan	80.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	4 laporan	530.000.000		Kab. Garut
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah laporan data koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup						1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	3 laporan	450.000.000		Kab. Garut
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah				25%	57.307.045.669	35%	93.550.000.000	45%	99.600.000.000	55%	180.750.000.000	55%	431.207.045.669	Bidang Pengelolaan Persampahan	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Tingkat Pengelolaan Sampah					57.307.045.669		93.550.000.000		99.600.000.000		180.750.000.000		431.207.045.669		

2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi yang tersedia									1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000		Kab. Garut	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah TPS 3R yang tersedia				2.867.611.269		10 unit	8.000.000.000	10 unit	9.000.000.000	10.000.000.000,00		29.867.611.269		Kab. Garut	
2.11.11.2.01.03	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Mesin Pengolah Sampah Yang tersedia						7 unit		10 unit				15 unit			
		Jumlah Komposter Yang Tersedia						36 unit		40 unit				50 unit			
		Jumlah Motor Pengangkut Sampah Yang tersedia				14.252.000.000		6 unit	8.000.000.000		10 unit				15 unit		
		Jumlah Tong Sampah Yang Tersedia						36 unit		40 unit					50 unit		
		Jumlah roda sampah yang tersedia						38 unit		40 unit					50 unit		

		Jumlah dokumen evaluasi capaian Jakstrada					1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen						
		Jumlah Tempat Pevadahan Sampah yang tersedia					15 buah		20 unit		25 unit						
		Jumlah alat berat yang beroperasi dan terpelihara				6 unit	6 unit		6 unit	30.000.000.000	6 unit	40.000.000.000,00		114.252.000.000		Kab. Garut	
2.11.11.2.01.04	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah TPA yang tertata				1 lokasi	1 lokasi		1 lokasi		1 lokasi						
		Jumlah kecamatan yang mengelola sampah				4 kecamatan	300.000.000	4 kecamatan	550.000.000	4 kecamatan	600.000.000	4 kecamatan	600.000.000,00		2.050.000.000		
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah kendaraan yang beroperasi				46 unit dumptruk/armroll, 31 motor pengangkut sampah	9.887.434.400	46 unit dumptruk/armroll, 31 motor pengangkut sampah	25.000.000.000	46 unit dumptruk/armroll, 31 motor pengangkut sampah	30.000.000.000	46 unit dumptruk/armroll, 31 motor pengangkut sampah	35.000.000.000,00		99.887.434.400		Kab. Garut

2.11.11.2.01.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah kendaraan yang tersedia						10 unit		15 unit		20 unit					
		Jumlah dokumen kerjasama									1 dokumen	150.000.000,00		150.000.000			Kab. Garut
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah alat berat yang tersedia				30.000.000.000		30.000.000.000	6 unit	30.000.000.000	6 unit	95.000.000.000,00		185.000.000.000			Kab. Garut
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Luas Tanah Yang Tersedia							10 Ha		5 Ha						
		Jumlah TPA yang terbangun									2 lokasi						

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut, ditetapkan Indikator Kinerja Pembangunan yang terdiri dari Indikator Kinerja Pembangunan Daerah sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan Kabupaten Garut dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Garut. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk itu, keterkaitan antara misi Kabupaten Garut dan urusan pemerintah yang dilimpahkan pada pemerintah harus dilakukan secara sinergis dan optimal. Keterkaitan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Garut lima tahun ke depan yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup adalah pelaksanaan misi ketiga yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan Serta Kemantapan Infrastruktur Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang”.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,97 poin	56,05 poin	57,62 poin	59,18 poin	60,75 poin	62,31 poin	62,31 poin

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,97 poin	56,05 poin	57,62 poin	59,18 poin	60,75 poin	62,31 poin	62,31 poin
2.	Tingkat Pengelolaan Sampah	21%	25%	25%	35%	45%	55%	55%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu standar yang diadopsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari Environmental Performance Index dan hasil pengembangan Virginia Commonwealth University dan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tanggal 9 Oktober 2015, Kementerian LHK mengeluarkan Surat Edaran Nomor S-263/P3EJw/10/2015 tentang IKLH yang mewajibkan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan IKLH sebagai salah satu program strategis. IKLH menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan vegetasi sebagai indikator kualitas lingkungan.

Keterangan:

Angka IKLH didapatkan dari konversi angka Indeks Pencemaran Air (IPA) dan Indeks Pencemaran Udara (IPU) menjadi Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam skala 1 – 100, dijumlahkan dengan angka IKTL dengan pembobotan tertentu, dengan formula sebagai berikut:

$$IKLH=(0,376 \times IKA)+(0,405 \times IKU)+(0,219 \times IKTL)$$

Dimana:

- IKA = Indeks Kualitas Air (IKA)
- IKU = Indeks Kualitas Udara (IKU)
- IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan meliputi :

- Pembatasan timbulan sampah;
- Pendaaur ulang sampah;
- Pemanfaatan kembali sampah.

Sedangkan kegiatan penanganan meliputi :

- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah 3R skala kawasan (TPS 3R), atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah 3R terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Untuk menghitung tingkat pengelolaan sampah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{(Jumlah Sampah Terkelola/Jumlah Sampah Total Administratif)}}{\times 100\%}$$

Tabel berikut menjelaskan indikator sasaran dan indikator program yang akan menjadi acuan bagi Renstra Dinas Lingkungan Hidup, target pencapaian yang akan diukur setiap tahun dalam periode perencanaan, dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2024).

Tabel 7.3
Indikator Sasaran dan Indikator Program

Indikator Sasaran	Program Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Program	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET					Penanggung Jawab Eselon III
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dokumen lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	Jumlah dokumen lingkungan yang dievaluasi dibagi jumlah dokumen lingkungan dalam 1 tahun x100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Tata Lingkungan
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH=(0,376 \times IKA)+(0,405 \times IKU)+(0,219 \times IKTL)$	Poin	56,05 poin	57,62 poin	59,18 poin	60,75 poin	62,31 poin	Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan
	Program Pengelolaan Keanekaragamanhayati (KEHATI)	Meningkatnya ruang terbuka hijau	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	Luas Ruang Terbuka Hijau (taman, hutan kota) yang dikelola /Total Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan x 100%	%	0,125%	0,136%	0,146%	0,156%	0,166%	Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Indikator Sasaran	Program Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Program	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET					Penanggung Jawab Eselon III
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengendalian B3 dan LB3	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	Jumlah pelaporan pengendalian B3/jumlah pelaporan dalam 1 tahun x 100%	%	100	100	100	100	100	Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kualitas dokumen lingkungan	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Produk Pembinaan dan Pengawasan yang tersedia	dokumen		4	3	3	3	Bidang Tata Lingkungan
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Menetapkan status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	lokasi			1	1	1	Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Indikator Sasaran	Program Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Program	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET					Penanggung Jawab Eselon III
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam PPLH	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	Jumlah kelurahan/desa berbudaya lingkungan/ jumlah kelurahan/desa berbudaya lingkungan yang ditetapkan x 100%	%			25	25	50	Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam PPLH	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	Jumlah sekolah /masyarakat berbudaya lingkungan/ jumlah sekolah/masyarakat berbudaya lingkungan yang ditetapkan x 100%	%		20	20	20	20	Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penanganan penyelesaian kasus lingkungan	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola (taman,hutan kota)	Jumlah penyelesaian kasus lingkungan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kasus lingkungan yang ada x100%	%	0,78	0,79	0,81	0,82	0,84	Bidang Tata Lingkungan
Tingkat pengelolaan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya upaya pengelolaan sampah	Tingkat pengelolaan sampah	(Jumlah Sampah Terkelola/Jumlah Sampah Total Administratif)x100%	%	97	98	98	99	99	Bidang Kebersihan

Indikator Sasaran	Program Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Program	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET					Penanggung Jawab Eselon III
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	Sekretariat

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut 2019-2024 ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut telah menetapkan beberapa gerakan besar, antara lain:

1. GERAKAN GARUT LENING

Melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

2. GERAKAN HEJO NGEMPLOH WALUNGAN BERSIH

Melalui konservasi dan kemitraan lingkungan serta pengendalian pencemaran lingkungan dan penataan hukum lingkungan.

3. GERAKAN TALITI GILIR (TATA LINGKUNGAN TI GIRANG KA HILIR)

Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen lingkungan yang terintegrasi untuk keselamatan bersama.

4. GERAKAN NATA MAHKOTA

Melalui pengembangan dan pembangunan tempat pemakaman umum, hutan kota dan taman.

5. GERAKAN TPA "SARAGA"

Melalui pembangunan TPA dengan pengelolaan sampah yang sarat edukasi, teknologi, bernilai tambah dan indah.

6. GERAKAN SI LABU UKUR

Melalui pembangunan laboratorium dan akreditasi laboratorium untuk pengukuran kualitas lingkungan.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup Kabupaten Garut dalam rentang waktu hingga tahun 2024, sekaligus sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan kinerja dan kegiatan tahunan.

Akhir kata semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kekuatan pada kita untuk dapat melaksanakan Rencana Strategis ini. Aamiin.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

